



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 - 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : renogptajambi@gmail.com

Nomor : W5-A/285/PP.00.4/ II /2022 16 Pebruari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Daftar Inventarisasi Masalah
Bahan Rapat Koordinasi Tahun 2022

Yth. Ketua Pengadilan Agama sewilyah PTA Jambi
di - Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :1027/DjA/PP.00.4/2/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal yang sama ada pokok Surat (surat terlampir).

Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 13 s.d. 15 Maret 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar kepada saudara Ketua Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi, untuk mengirimkan bahan Rapat Koordinasi berupa Daftar Inventaris Masalah (DIM) Bidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan di Satuan Kerja masing-masing sebagaimana format terlampir dalam bentuk file Microsoft Word dan Portable Document Form (PDF), paling lambat hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, jam 16.30 WIB., ke PTA Jambi Cq. Panmud Hukum e-Mail : hukumpanitera@gmail.com,

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua



Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. f
NIP. 19550816.198103.1.004.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 By Pass Jakarta Pusat 10510
Telepon (021) 29079177 Faksimile (021) 29079277, 29079211
Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id
e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1027/DjA/PP.00.4/2/2022
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Permohonan Daftar Inventarisasi Masalah
Bahan Rapat Koordinasi Tahun 2022

15 Februari 2022

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Peradilan Agama
di –
Seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan koordinasi di lingkungan peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 13 s.d. 15 Maret 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia mengirimkan bahan Rapat Koordinasi berupa Daftar Inventaris Masalah (DIM) Bidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan di wilayah hukum masing-masing sebagaimana format terlampir dalam bentuk *file Microsoft Word* dan *Portable Document Form (PDF)* yang telah dibubuhkan tanda tangan dan pengesahan, diunggah (*upload*) melalui *link google form*: <http://bit.ly/DaftarInventarisasiMasalahRakor2022> paling lambat hari Jumat tanggal 25 Februari 2022.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Jenderal, ↙

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : 1027/DjA/PP.00.4/2/2022
Tanggal : 15 Februari 2022

Daftar Inventarisasi Masalah
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama.....

I. Daftar Inventarisasi Masalah Teknis Yustisial

No	Norma	Permasalahan	Usulan Solusi
1	2	3	4

II. Daftar Inventarisasi Masalah Administrasi Kepaniteraan

No	Norma	Permasalahan	Usulan Solusi
1	2	3	4

III. Daftar Inventarisasi Masalah Administrasi Kesekretariatan

No	Norma	Permasalahan	Usulan Solusi
1	2	3	4

.....
Ketua Pengadilan Tinggi Agama

.....

Keterangan:

1. Norma sebagaimana dalam kolom 2
Diisi dengan aturan/kebijakan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundangan atau mempunyai kendala dalam penerapannya.
2. Permasalahan sebagaimana dalam kolom 3
Diisi dengan hambatan atau kendala atas pelaksanaan norma dengan menggunakan kalimat sederhana, jelas dan ringkas.
3. Usulan Solusi sebagaimana dalam kolom 4
Diisi dengan saran atau masukan untuk mengatasi permasalahan sekaligus redaksi perubahan terhadap norma yang dipermasalahkan.